

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara membutuhkan pendanaan dalam menggerakkan dan menyelenggarakan roda pemerintahan. Beberapa sumber pendanaan negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan barang-barang inventaris kekayaan negara yang dikelola secara langsung oleh negara. Oleh karenanya, APBN dan barang-barang inventaris kekayaan negara merupakan unsur penting dalam keuangan negara. Dilain pihak, pada tingkat Pemerintah Daerah (Pemda), terdapat pula beberapa sumber pendanaan yang serupa dengan keuangan negara berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta barang-barang inventaris kekayaan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Baik APBD maupun barang-barang inventaris kekayaan daerah dikelola secara langsung oleh daerah.

Untuk mengurus daerahnya sendiri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota dapat melakukan urusan pemerintahan menurut asas otonomi sesuai dengan UUD pasal 18 ayat (2) 1945. Menurut Suwarno (2008), otonomi daerah adalah bentuk dari keleluasaan daerah dalam pengambilan keputusan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Agar otonomi daerah terlaksana, pemerintah harus sigap dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi potensi-potensi yang dapat dijadikan sumber pendanaan dalam pembangunan daerah, terutama pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan PAD dapat menjadi tolak ukur atas kemampuan daerah untuk mandiri yang tercermin

dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi.

Disamping itu, dibutuhkan juga kemandirian daerah untuk mengelola keuangan daerah dalam pelaksanaan otonominya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 (3) mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah merupakan bagian dari sistem pembagian keuangan yang adil dalam penyelenggaraan desentralisasi dan dekonsentrasi pemerintahan.

Bentuk dari kemandirian daerah dapat berupa kemandirian dalam perencanaan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pengembangan potensi PAD merupakan hal yang penting dalam pembangunan daerah. Menurut Riyardi dkk (2002), sehubungan dengan dengan peningkatan penerimaan daerah dari PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaannya dengan melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan daerah dari PAD. Dengan memisahkan item pajak dan retribusi daerah dari item bagi hasil laba BUMD dan penerimaan lainnya yang sah, terlihat bahwa peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak dan retribusi daerah. Adapun intensifikasi dan ekstensifikasi melalui pungutan lebih mudah dilakukan oleh pemerintah daerah mengingat salah satu fungsi pemerintah adalah mengatur. Untuk memenuhi kebutuhannya, pemerintah berhak melakukan pungutan sesuai dengan undang-undang.

Pemerintah daerah Kota Padang melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Berikut adalah gambaran realisasi pajak daerah Kota Padang tahun 2011-2015:

Tabel 1.1
 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
 Kota Padang Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi	Pertumbuhan (%)
2011	102.412.437.200	-
2012	128.595.100.667	25,56
2013	165.460.994.275	28,67
2014	194.620.516.566	17,62
2015	219.519.832.689	12,79

Sumber: Dispenda Kota Padang Tahun 2011-2015

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak daerah selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki sumber-sumber yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Dengan alasan itulah dipilih Kota Padang sebagai objek penelitian. Pajak yang telah dipungut kemudian dialokasikan, salah satunya untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah. Namun, dapat dilihat pada tabel bahwa persentase pertumbuhan pajak daerah cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 tingkat pertumbuhan pajak daerah mengalami kenaikan namun terus menurun hingga tahun 2015. Dari interpretasi tabel diatas, dinilai bahwa pertumbuhan tiap elemen pajak mempengaruhi tingkat pertumbuhan pajak daerah itu sendiri.

Sebagai salah satu dari sumber PAD, pajak daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah sehingga dapat memperlancar

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Yang dimaksud dengan pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 (10) ialah kontribusi wajib dari wajib pajak kepada daerah yang sifatnya memaksa dan didasarkan pada Undang-Undang dimana kontreprestasi tidak dirasakan secara langsung.

Oleh karena itu, perhitungan akan besaran kontribusi pajak daerah menjadi penting. Disamping itu, proyeksi penerimaan pajak daerah diperlukan untuk memberikan gambaran akan besaran potensi pajak yang dapat diterima sehingga pemerintah dapat mengambil tindakan untuk memenuhi proyeksi tersebut. Berdasarkan dari pemikiran ini timbul ketertarikan untuk meneliti **“Analisis Pertumbuhan, Kontribusi, dan Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2011-2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan Pajak Daerah Kota Padang Sebagai Sumber PAD?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang?
3. Bagaimana proyeksi penerimaan Pajak Daerah Kota Padang 3 tahun mendatang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Daerah Kota Padang.
3. Untuk mengetahui besaran proyeksi penerimaan Pajak Daerah Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi Pemerintah daerah Kota Padang tentang pertumbuhan, kontribusi, dan proyeksi Pajak Daerah Kota Padang sehingga bisa melakukan evaluasi dan membuat kebijakan kedepannya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi tentang Pajak Daerah Kota Padang serta pengaruhnya terhadap PAD sehingga masyarakat mengetahui bahwa membayar pajak merupakan hal yang penting.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan penulis tentang penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah dan agar tidak terjadinya permasalahan dalam penguraian isi dari tulisan ini maka penulis membuat sistematika penulisan yang bertujuan agar tulisan ini lebih mudah di pahami dan terarah dalam mencapai tujuan dari judul yang telah kemukakan diatas.

BAB I: Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan ini diuraikan latar belakang masalah yang berisi tentang alasan pengambilan topik ataupun judul penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

BAB II: Tinjauan Literatur

Tinjauan Literatur ini memberikan gambaran umum tentang apakah yang dimaksud dengan Pajak Daerah serta gambaran umum berkaitan lainnya.

Disamping itu pada bab ini juga diterakan hasil-hasil dari penelitian terdahulu dan juga diungkapkan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai subjek, objek, serta metode-metode yang akan digunakan peneliti dalam penelitiannya.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil yang telah diolah oleh peneliti mengenai masalah yang ingin dibahas. Juga diungkapkan bagaimana pertumbuhan, kontribusi serta proyeksi penerimaan Pajak Daerah.

BAB V: Penutup

Bab ini adalah bab terakhir dan sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang bersifat membantu dalam penelitian.

